

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah ialah interaksi dimana pemerintahan daerah serta masyarakat mengawasi aset yang ada dan menyusun bentuk kerjasama diantara pemerintahan daerah dengan sektor swasta dalam membuat lapangan pekerjaan baru serta menggerakkan kemajuan tindakan perekonomian diwilayahnya.

Isu utama dalam pembangunan ekonomi ada dalam penekanan pada pengaturan perbaikan yang bergantung pada daerah yang terlibat dengan memanfaatkan kemampuan SDM, instansi, dan aset aktual secara lokal (lokal). Arah ini mendorong kita untuk mengambil mulai dari area dalam interaksi kemajuan untuk membuka pintu terbuka posisi baru dan memperkuat pergerakan moneter yang diperluas.

Ini sebagai peluang yang baik untuk pemerintah lingkungan dalam menunjukkan kapasitasnya untuk melakukan posisi yang menjadi hak daerah. Daerah yang maju ataupun tidak sebagian besar penentuannya dari kemampuan serta kesiapan untuk melaksanakannya, khususnya pemerintah daerah. Pemerintah lingkungan diperbolehkan untuk membuat dan menempatkan diri mereka di luar sana untuk mengembangkan daerah mereka, tentu saja tanpa mengabaikan pengaturan undang-undang tersebut.

Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah lingkungan untuk menguasai daerahnya sendiri dengan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Aturan tentang otonomi daerah tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004

Sektor pariwisata adalah daerah yang menjadi andalan pendapatan provinsi. Sehingga pemerintah Jambi biasa perlu memiliki opsi untuk mengkaji dan menangani potensi industri perjalanannya untuk memperoleh sumber mata air aset.

Sumber utama pendapatan daerah diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pembayaran yang dipungut sesuai pedoman wilayah dan pedoman hukum. Berarti menawarkan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kemerdekaan provinsi sesuai potensi wilayah sebagai indikasi desentralisasi.

Sumber utama utama PAD adalah tugas-tugas terdekat. Mengingat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, kemudian disebut sebagai pengeluaran, yaitu iuran wajib terutang oleh orang ataupun unsur yang sifatnyamemaksa menurut Undang-undang, dengan tidak segera dibayar dan dipergunakan untuk kepentingan daerah untuk sebesar-besarnya keberhasilan individu.

Tabel 1.1 Jumlah Hotel di Provinsi Jambi Pada Tahun 2018- 2020 (Unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Kerinci	9	11	11
Merangin	21	23	23
Sarolangun	13	13	13
Batanghari	4	9	9
Muaro Jambi	1	1	1
Tanjung Jabung Timur	6	6	6
Tanjung Jabung Barat	11	11	11
Tebo	8	13	13
Bungo	21	33	33
Kota Jambi	93	99	99
Kota Sungai Penuh	13	17	18
Total	200	236	237

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pembangunan hotel dalam periode tiga tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup berarti. Dapat dilihat untuk tahun 2018 jumlah hotel di Provinsi Jambi sebanyak 200 hotel, tahun 2019 bertambah menjadi 236 hotel yang tersebar di seluruh Provinsi Jambi. Pada tahun 2020 jumlahnya bertambah menjadi 237 hotel total di Provinsi Jambi.

Tabel 1.2 Total PDRB Di Provinsi Jambi Pada Tahun 2018- 2020 (Juta)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Kerinci	6.081,91	6.387,03	6.559,98
Merangin	9.394,41	9.847,09	9.865,54
Sarolangun	10.298,36	10.821,57	10.729,47
Batanghari	11.161,79	11.719,20	11.666,11
Muaro Jambi	15.405,60	16.185,22	16.194,86
Tanjung Jabung Timur	17.265,16	17.998,11	17.273,09
Tanjung Jabung Barat	29.287,03	30.794,17	30.548,74
Tebo	9.701,66	10.165,12	10.156,57
Bungo	12.051,80	12.575,69	12.507,63
Kota Jambi	18.661,33	19.655,79	18.918,89
Kota Sungai Penuh	4.394,53	4.619,53	4.602,98
Total	142.968,30	149.264,62	149.023,86

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)2015-2020

Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat salah satunya dari total PDRB di suatu daerah. Pada tahun 2018 total PDRB di Provinsi jambi sejumlah 142.968,30 juta rupiah meningkat pada tahun 2019 menjadi 149.264,62 juta rupiah dan kembali berfluktuasi meningkat menjadi 149.023,86 pada tahun 2020. Jika diperhatikan selama 3 tahun total PDRB terbesar dihasilkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, setiap tahun nya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan yang stabil.

Tabel 1.3 Tingkat Hunian Hotel Di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2020(Persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Kerinci	57.45	55.25	58.34
Merangin	81.78	87.76	88.76
Sarolangun	44.12	42.66	40.57
Batanghari	14.78	19.42	15.35
Muaro Jambi	23.56	38.58	35.56
Tanjung Jabung Timur	19.24	26.51	25.67
Tanjung Jabung Barat	34.32	45.11	43.13
Tebo	56.41	69.35	65.45
Bungo	22.13	35.21	33.14
Kota Jambi	47.16	48.91	50.72
Kota Sungai Penuh	58.3	57.3	58.24
Total	36.52	42.8	41.5

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data yang di keluarkan BPS ditunjukan tingkat hunian hotel pada 2018 senilai 36.52%, kemudian pada 2019 senilai 42.8% serta meningkat senilai 41.5% pada 2020.

Tabel 1.4 Pajak Hotel Di Provinsi Jambi Pada Tahun 2018 – 2020 (Juta)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Kerinci	17.263	30.917	43.245
Merangin	214.857	339.554	483.000
Sarolangun	241.788	223.319	234.000
Batanghari	131.779	104.993	131.000
Muaro Jambi	44.565	56.870	58.250
Tanjung Jabung Timur	5.200	7.880	8.000
Tanjung Jabung Barat	303.149	390.133	428.500
Tebo	39.461	47.680	49.000
Bungo	1.608.598	1.623.810	1.802.200
Kota Jambi	12.802.676	17.621.003	18.975.000
Kota Sungai Penuh	289.387	197.136	247.621
Total	15.698.723	20.652.295	22.459.816

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Besarnya realisasi penerimaan pajak hotel di Provinsi Jambi pada 2018 senilai Rp. 15.698.723.000, lalu di setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Di tahun selanjutnya menjadi sebesar Rp. 20.652.295.000 pada tahun 2019. Kemudian kembali meningkat di tahun 2020 menjadi Rp.22.459.816. Penerimaan pajak khususnya pajak hotel di Provinsi Jambi dapat dikatakan baik karena di setiap tahun selalu berfluktuasi meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan PDRB, tingkat hunian hotel dan jumlah hotel di Provinsi Jambi periode tahun 2015 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, tingkat hunian hotel dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Provinsi Jambi periode tahun 2015 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perkembangan PDRB, tingkat hunian hotel, dan jumlah hotel di Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB, tingkat hunian hotel, dan jumlah hotel terhadap besarnya penerimaan pajak hotel di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diandalkan bisa memberi masukan dan informasi kepada :

1. Akademis

Sebagai penyumbang wawasan akademis bagi para peneliti dan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terutama tentang Penerimaan Pajak Hotel di Provinsi Jambi.

2. Praktisi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam menetapkan kebijakan.